AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/aldyas.v5i3.11506

PERAN PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BANJIR LAHAR DINGIN PASCA ERUPSI GUNUNG MARAPI

Role of the Nagari Sungai Pua Government in Efforts to Mitigate Cold Lahar Flooding Following the Eruption of Mount Marapi

Ahmad Radifan. S & Yuliarti
Universitas Negeri Padang
ahmadradifans@gmail.com; yuliarti@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 14, 2026	Jul 12, 2026	Jul 24, 2026	Jul 29, 2026

Abstract

Cold lahar flooding following the eruption of Mount Marapi has caused significant damage to settlements, agricultural land, infrastructure, and the socioeconomic activities of communities in Agam Regency. This condition requires the active role of the nagari government as the frontline level of government in implementing disaster management and recovering affected areas. This study aimed to analyze the role of the Sungai Pua Nagari Government in managing cold lahar flooding following the eruption of Mount Marapi and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The study employed a qualitative approach with a descriptive design. Informants were selected purposively and comprised representatives of the Nagari Government, relevant agencies, and affected communities. Data were collected through observation, interviews, and documentation and were subsequently analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the Sungai Pua Nagari Government performed its role through three aspects, namely as a regulator, facilitator, and implementer. As a regulator, the nagari government formulated policies and supported the management of disaster-prone areas. As a facilitator, the nagari

Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

government coordinated various parties and facilitated the distribution of assistance, the relocation of residents, the recovery of agricultural land, and infrastructure repairs. As an implementer, the nagari government was directly involved in rehabilitation, reconstruction, and community mutual-assistance activities. The implementation of these roles was supported by high community participation, interinstitutional coordination, and support from the government and volunteers. However, limited budgets, human resources, facilities and infrastructure, and the extensive affected area meant that the recovery process had not yet been fully optimized. This study concluded that the Sungai Pua Nagari Government had performed a strategic role in post-disaster management and recovery, but the effectiveness of its implementation still required stronger institutional and resource capacity. These findings provide practical implications for nagari governments in improving coordination, resource preparedness, and the sustainability of disaster management programs in disaster-prone areas.

Keywords: Cold Lahar Flooding; Mount Marapi; Post-Disaster; Disaster Management; Role of the Nagari Government

Abstrak: Banjir lahar dingin pascaerupsi Gunung Marapi telah menimbulkan kerusakan signifikan terhadap permukiman, lahan pertanian, infrastruktur, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Agam. Kondisi tersebut menuntut peran aktif pemerintah nagari sebagai unsur pemerintahan terdepan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemulihan wilayah terdampak. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Nagari Sungai Pua dalam penanggulangan banjir lahar dingin pascaerupsi Gunung Marapi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan dipilih secara *purposive* yang terdiri atas unsur Pemerintah Nagari, instansi terkait, dan masyarakat terdampak. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Sungai Pua menjalankan perannya melalui tiga aspek, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana. Sebagai regulator, pemerintah nagari menyusun kebijakan dan mendukung penataan kawasan rawan bencana. Sebagai fasilitator, pemerintah nagari mengoordinasikan berbagai pihak serta memfasilitasi penyaluran bantuan, relokasi warga, pemulihan lahan pertanian, dan perbaikan infrastruktur. Sebagai pelaksana, pemerintah nagari terlibat langsung dalam rehabilitasi, rekonstruksi, dan kegiatan gotong royong bersama masyarakat. Pelaksanaan peran tersebut didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat, koordinasi antarlembaga, serta dukungan pemerintah dan relawan. Namun, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta luasnya wilayah terdampak menyebabkan proses pemulihan belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Nagari Sungai Pua telah menjalankan peran strategis dalam penanggulangan dan pemulihan pascabencana, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah nagari dalam meningkatkan koordinasi, kesiapan sumber daya, dan keberlanjutan program penanggulangan bencana di wilayah rawan bencana.

Kata Kunci: Banjir Lahar Dingin; Gunung Marapi; Pascabencana; Penanggulangan Bencana; Peran Pemerintah Nagari

PENDAHULUAN

Pemerintah Nagari memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Sumatera Barat karena menjadi aktor pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Dalam konteks penanggulangan bencana, kedekatan ini menjadikan pemerintah nagari sebagai pihak yang paling memahami kondisi sosial, budaya, serta karakteristik geografis wilayahnya. Efektivitas penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh kapasitas dan peran pemerintah lokal dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, seperti pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat (Dwiyanto, 2021). Maka itu, peran pemerintah nagari dalam penanggulangan bencana seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif kebencanaan modern, pencegahan dan mitigasi merupakan tahap paling krusial dalam upaya pengurangan risiko bencana (Birkmann et al., 2023). Namun demikian, tahap pascabencana juga tidak kalah pentingnya karena menyangkut pemulihan masyarakat yang terdampak secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam (UNDRR, 2022) menegaskan bahwa pemerintah lokal memegang peran sentral dalam memastikan respons bencana yang cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak. Sejalan dengan itu, (Coppola, 2015) menjelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan proses berkelanjutan yang mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, dan pemulihan, dengan penekanan pada pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas adaptif masyarakat. Pemerintah nagari diharapkan mampu menerjemahkan kerangka tersebut ke dalam kebijakan dan tindakan nyata, terutama dalam pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana.

Kajian mengenai peran pemerintah lokal dalam penanggulangan bencana menunjukkan bahwa pemerintah desa atau nagari masih menghadapi keterbatasan dalam menjalankan peran penanggulangan bencana, baik dari sisi sumber daya, perencanaan, maupun koordinasi (Suryanto & Prasetyo, 2020). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik penanggulangan bencana di lapangan yang berdampak pada lambatnya proses pemulihan masyarakat terdampak. Kesenjangan tersebut menjadi tantangan serius, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi seperti kawasan sekitar Gunung Marapi.

Di Provinsi Sumatera Barat, peran pemerintah nagari dalam penanggulangan bencana menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring tingginya tingkat kerawanan bencana

geologi dan hidrometeorologi. Gunung Marapi sebagai salah satu gunung api paling aktif secara historis telah mengalami erupsi berulang yang menghasilkan material vulkanik dalam jumlah besar (PVMBG, 2023). Erupsi besar pada Desember 2023 menyebabkan akumulasi abu dan material lepas di lereng gunung yang Berpotensi memicu banjir lahar dingin ketika terjadi curah hujan tinggi, terutama pada musim penghujan (BNPB, 2024). Berbeda dengan lahar panas, lahar dingin terjadi tanpa adanya aktivitas erupsi yang sedang berlangsung, namun tetap bersifat sangat berbahaya karena dapat muncul secara tiba-tiba di wilayah yang dipenuhi material vulkanik lepas. Kondisi ini umumnya ditemukan di kawasan lereng gunung dan daerah aliran sungai yang berhulu langsung dari Gunung Marapi, dengan karakteristik topografi curam serta aliran sungai yang mengarah ke wilayah permukiman penduduk (Lavigne et al., 2000; Rahadhatul & Hermon, 2023). Situasi tersebut menuntut kesiapan dan kemampuan pemerintah nagari dalam melakukan penanggulangan bencana secara cepat, terkoordinasi, dan berbasis kondisi lokal.

Dampak banjir lahar dingin di Kabupaten Agam pada tahun 2024 menunjukkan besarnya risiko yang dihadapi masyarakat, dengan tercatat 23 korban jiwa dan kerugian material sekitar Rp23 miliar (Ananda, 2025). Selain itu, lebih dari 176 hektare lahan pertanian terdampak sehingga mengganggu sumber mata pencaharian utama masyarakat dan melemahkan ketahanan ekonomi rumah tangga (BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2024). Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Agam (2024), terdapat beberapa nagari yang terdampak banjir lahar dingin, yaitu Nagari Sungai Pua, Nagari Candung, Nagari Batu Palano, Nagari Koto Gadang, dan Nagari Bukik Batabuah. Di antara nagari-nagari tersebut, Nagari Sungai Pua menempati posisi dengan tingkat kerusakan tertinggi.

Secara geografis, Nagari Sungai Pua berada di sekitar daerah aliran sungai Batang Marao yang berhulu langsung ke Gunung Marapi, sehingga memiliki tingkat kerentanan dan risiko yang tinggi terhadap ancaman aliran lahar dingin (PVMBG, 2023). Ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian dan sumber daya air menjadikan ancaman bencana ini semakin signifikan, terutama pascaerupsi Gunung Marapi tahun 2023 yang menyebabkan akumulasi material vulkanik berpotensi terbawa aliran sungai pada saat curah hujan tinggi (Dinas Sosial Kabupaten Agam, 2022; RRI, 2024). Dengan demikian, tingkat keparahan dampak dan posisi geografis yang rentan menjadikan Nagari Sungai Pua sebagai lokasi yang paling relevan untuk mengkaji peran pemerintah nagari dalam penanggulangan banjir lahar dingin pascabencana.

Dalam kondisi ideal, penanggulangan banjir lahar dingin seharusnya difokuskan pada tahap pascabencana melalui upaya pemulihan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Pemerintah nagari diharapkan mampu melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Upaya penanggulangan pada tahap pascabencana tersebut mencakup pemberian bantuan kepada korban, pemulihan infrastruktur, perbaikan lingkungan, serta penguatan kembali kapasitas masyarakat agar lebih tangguh dalam menghadapi bencana di masa mendatang. Pendekatan ini menjadi penting mengingat dampak banjir lahar dingin tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Secara normatif, kondisi ideal penanggulangan bencana tersebut telah diatur dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah nagari untuk melaksanakan pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat, termasuk dalam upaya pengurangan risiko dan penanggulangan bencana. Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana menempatkan pemerintah nagari sebagai aktor pelaksana penanggulangan bencana di tingkat lokal.

Namun, hingga saat ini, proses pemulihan masih berlangsung dan belum seluruhnya tuntas. Masih terdapat unit rumah yang belum direhabilitasi karena keterbatasan kapasitas pemerintah nagari dan bantuan yang belum tersalurkan secara merata. Lahan pertanian masih tertutup material vulkanik dan belum dapat ditanami kembali, menyebabkan penurunan pendapatan petani dari kondisi normal. Selain itu, jalan penghubung antar jorong masih dalam tahap perbaikan, sehingga akses masyarakat untuk beraktivitas ekonomi dan sosial masih terganggu. Proses pemulihan yang lambat ini menunjukkan bahwa peran pemerintah nagari dalam penanggulangan pascabencana masih belum optimal dan menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana penanggulangan bencana. Penelitian (Nisak & Alhadi, 2024) juga mengungkapkan bahwa kendala dalam penanggulangan bencana di tingkat nagari meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang profesional di bidang kebencanaan serta tidak memadainya sarana dan prasarana kebencanaan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Ilham & Alhadi, 2024) yang menyatakan bahwa pemerintah nagari memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana, termasuk pada tahap pemulihan pascabencana. Peran tersebut mencakup peran utama dalam pengambilan keputusan saat darurat, peran formal sesuai mandat kelembagaan, peran sosial dalam fasilitasi

pemulihan masyarakat, serta peran kultural dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dalam upaya penanganan bencana. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kewenangan teknis dan minimnya pelatihan berbasis risiko lokal. Sejalan dengan itu, penelitian (Ananda, 2025) mengungkapkan bahwa tingkat kesiapsiagaan keluarga di Nagari Sungai Pua masih tergolong rendah, dengan 60,2% keluarga dalam kategori kurang siap menghadapi banjir lahar dingin. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan tersebut meliputi usia, pendapatan, dan pengalaman pelatihan bencana. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga harus mencakup penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan edukasi kebencanaan yang berkelanjutan.

Penelitian ini penting dilakukan karena hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Nagari Sungai Pua dalam menjalankan perannya pada tahap pascabencana. Temuan penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bentuk peran yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang perlu diperkuat untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak banjir lahar dingin. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi nagari lain yang memiliki karakteristik kerawanan bencana serupa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Pemerintah Nagari Sungai Pua dalam upaya penanggulangan banjir lahar dingin pascaerupsi Gunung Marapi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan peran Pemerintah Nagari Sungai Pua dalam penanggulangan banjir lahar dingin pascaerupsi Gunung Marapi. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penggalian data berupa pengalaman, pandangan, dan aktivitas informan dalam konteks alamiah (Moleong, 2021). Penelitian dilaksanakan di Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang dipilih karena merupakan salah satu wilayah dengan dampak banjir lahar dingin paling signifikan pascaerupsi Gunung Marapi.

Waktu penelitian dilakukan dalam lima bulan yaitu Desember 2025 sampai April 2026. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2019) dan terdiri

atas 11 orang, yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Seksi Pelayanan, perwakilan BPBD Kabupaten Agam, Ketua LKAM, relawan, serta lima orang masyarakat terdampak. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen pendukung. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2022).

HASIL

Peran Pemerintah Nagari Sungai Pua dalam Upaya Penanggulangan Banjir Lahar Dingin

Pelaksanaan peran Pemerintah Nagari Sungai Pua dalam upaya penanggulangan banjir lahar dingin pascaerupsi Gunung Marapi didasarkan pada indikator peran pemerintah menurut Sedarmayanti yang mencakup tiga aspek utama, yaitu peran sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana. Strategi utama yang dijalankan mencakup penyusunan kebijakan, koordinasi dengan berbagai pihak, penyaluran bantuan, rehabilitasi infrastruktur, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

1. Peran sebagai Regulator

Peran regulator merupakan fungsi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan pedoman sebagai dasar pelaksanaan penanggulangan bencana (Sedarmayanti, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Sungai Pua belum memiliki Peraturan Nagari yang secara khusus mengatur penanggulangan banjir lahar dingin. Pelaksanaan penanggulangan bencana masih mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun pemerintah nagari tetap mendukung kesiapsiagaan melalui pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan pengalokasian anggaran dari dana desa. Sebagaimana disampaikan oleh Wali Nagari Sungai Pua:

"Kalau peraturan nagari yang khusus untuk penanggulangan bencana tidak ada. Tapi kalau peraturan dan struktur penanganan bencana itu sudah diatur sama pemerintah daerah.... Kita tetap tiap tahun menganggarkan dari dana desa untuk siap siaga bencana ini karena aturannya sudah ada."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum memiliki regulasi khusus, Pemerintah Nagari tetap menjalankan fungsi regulator dengan melaksanakan kebijakan yang

telah ditetapkan pemerintah di atasnya serta membentuk kelembagaan dan menyediakan anggaran untuk mendukung kesiapsiagaan bencana.

Dalam penyusunan kebijakan pemulihan pascabencana, Pemerintah Nagari juga menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Sekretaris Nagari menjelaskan:

"Proses penyusunan rencana pemulihan selalu kami lakukan secara partisipatif. Biasanya, kami mengadakan rapat bersama Pemerintah Nagari, Bamus, tokoh masyarakat, Kelompok Siaga Bencana (KSB), dan masyarakat yang terdampak."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah sehingga kebutuhan masyarakat terdampak dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pemulihan.

Meskipun demikian, aspek pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam dokumen RPJM Nagari karena adanya keterbatasan kewenangan pemerintah nagari. Hal ini diungkapkan oleh Wali Nagari:

"Kalau RPJM Nagari ada, tapi yang menjurus ke arah bencana tidak ada.... Walaupun kita punya Dana Desa, pihak nagari tidak bisa bergerak karena ada batasan kewenangan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan menjadi kendala bagi pemerintah nagari dalam menyusun program kebencanaan secara lebih komprehensif, terutama untuk penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun provinsi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Nagari Sungai Pua sebagai regulator telah dijalankan melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah, pembentukan Kelompok Siaga Bencana, penyediaan anggaran kesiapsiagaan, serta penyusunan kebijakan secara partisipatif. Namun, peran tersebut masih perlu diperkuat melalui penyusunan Peraturan Nagari khusus kebencanaan dan integrasi aspek pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nagari.

2. Peran sebagai Fasilitator

Peran fasilitator merupakan fungsi pemerintah dalam menyediakan dukungan, pelayanan, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mempercepat proses pemulihan masyarakat pascabencana. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Nagari Sungai Pua telah menjalankan peran tersebut melalui pendataan masyarakat terdampak, pelayanan administrasi bantuan, koordinasi dengan BPBD, Kelompok Siaga Bencana (KSB), serta

instansi terkait lainnya. Pemerintah nagari juga memfasilitasi penyaluran bantuan logistik, bantuan perbaikan rumah, relokasi masyarakat yang berada di zona rawan, hingga bantuan pemulihan ekonomi berupa bibit pertanian dan permodalan melalui BUMNag. Berbagai bentuk fasilitasi tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setelah terjadinya banjir lahar dingin.

Pelaksanaan peran tersebut didukung oleh koordinasi yang baik antara Pemerintah Nagari dengan pemerintah kabupaten, BPBD, relawan, serta berbagai lembaga lainnya. Koordinasi dilakukan mulai dari proses pendataan korban, verifikasi penerima bantuan, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat. Keberadaan Kelompok Siaga Bencana (KSB) juga menjadi pendukung penting karena mampu memberikan respons awal ketika bencana terjadi sebelum bantuan dari pemerintah kabupaten tiba di lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan berbagai instansi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana disampaikan oleh Wali Nagari Sungai Pua:

"Kalau BPBD langsung turun kan jauh, jadi kadang KSB yang turun lebih dahulu. Kalau banjir, itu KSB yang duluan ke lapangan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang dibangun antara Pemerintah Nagari, BPBD, dan KSB telah mendukung percepatan penanganan keadaan darurat sekaligus memperlancar proses penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Masyarakat juga merasakan manfaat dari peran fasilitator yang dijalankan Pemerintah Nagari. Bantuan kebutuhan pokok, bantuan perbaikan rumah, relokasi bagi masyarakat yang berada di zona merah, hingga bantuan pemulihan sektor pertanian telah diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan pascabencana. Selain itu, pelayanan administrasi yang diberikan pemerintah nagari mempermudah masyarakat dalam mengurus persyaratan untuk memperoleh berbagai bentuk bantuan dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Sungai Pua telah menjalankan peran sebagai fasilitator dengan cukup baik melalui penyediaan pelayanan administrasi, koordinasi lintas lembaga, penyaluran bantuan, dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana, anggaran, dan kewenangan sehingga proses pemulihan belum dapat berjalan secara optimal.

3. Peran sebagai Pelaksana

Peran pelaksana merupakan fungsi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan program penanggulangan bencana melalui berbagai kegiatan pemulihan pascabencana. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Nagari Sungai Pua telah menjalankan peran tersebut melalui pendataan korban, pendampingan administrasi, penyaluran bantuan, rehabilitasi lingkungan, serta mendukung rekonstruksi infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah nagari juga melibatkan masyarakat, relawan, dan berbagai lembaga dalam kegiatan gotong royong untuk mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak.

Pelaksanaan penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi sehingga bantuan dapat diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Nagari juga berperan dalam menyalurkan bantuan yang berasal dari pemerintah maupun donatur serta mendampingi masyarakat selama proses pemulihan. Di bidang ekonomi, pemerintah nagari memfasilitasi bantuan bibit pertanian dan program permodalan melalui BUMNag agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonominya. Sebagaimana disampaikan oleh Wali Nagari Sungai Pua:

"Kalau sekarang alhamdulillah tepat waktu dan kalau yang kami rasakan di nagari ada tepat sasaran. Kalau ada bantuan donasi yang masuk dari masyarakat atau perantau, pihak nagari juga menyalurkan kepada korban yang terdampak."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari berupaya memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran melalui pendataan yang baik serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan berbagai pihak lainnya. Hal ini juga didukung oleh keterlibatan pemerintah nagari dalam kegiatan gotong royong, pendampingan masyarakat, dan pemulihan fasilitas umum sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Sungai Pua telah menjalankan peran sebagai pelaksana dengan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari terlaksananya penyaluran bantuan, pendampingan masyarakat, rehabilitasi lingkungan, serta dukungan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kewenangan, serta luasnya dampak bencana sehingga proses pemulihan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dalam waktu yang singkat.

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung peran Pemerintah Nagari Sungai Pua dalam penanggulangan banjir lahar dingin pascaerupsi Gunung Marapi. Faktor pertama adalah tingginya semangat gotong royong masyarakat yang tercermin dari keterlibatan masyarakat, relawan, dan perantau dalam proses evakuasi, pembersihan material banjir, serta penyaluran bantuan. Faktor kedua adalah koordinasi yang baik antara Pemerintah Nagari dengan BPBD, Kelompok Siaga Bencana (KSB), pemerintah kabupaten, serta berbagai instansi lainnya sehingga proses penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah, relawan, dan perantau dalam bentuk bantuan logistik, alat berat, serta pendampingan teknis turut mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan masyarakat terdampak. Sebagaimana disampaikan oleh Wali Nagari Sungai Pua:

"Peran perantau sangat besar, baik melalui bantuan dana maupun penyediaan alat berat sehingga sangat membantu proses penanganan dan pemulihan pascabencana."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak menjadi modal utama dalam mendukung efektivitas penanggulangan banjir lahar dingin di Nagari Sungai Pua.

2. Faktor Penghambat

Di samping berbagai faktor pendukung, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kendala yang memengaruhi pelaksanaan penanggulangan banjir lahar dingin. Kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran, terbatasnya kewenangan Pemerintah Nagari dalam menangani infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten maupun provinsi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Selain itu, luasnya wilayah terdampak dan kondisi geografis juga menyebabkan proses penanganan dan pemulihan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebagian masyarakat juga masih enggan direlokasi karena memiliki keterikatan dengan lahan pertanian dan tempat tinggal yang telah lama dihuni. Sebagaimana diungkapkan oleh Wali Nagari Sungai Pua:

"Hambatan utama kami adalah keterbatasan anggaran dan kewenangan, karena banyak infrastruktur yang rusak merupakan kewenangan pemerintah kabupaten sehingga proses penanganannya harus melalui usulan terlebih dahulu."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan kewenangan menjadi tantangan utama bagi Pemerintah Nagari dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah nagari, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Implementasi peran Pemerintah Nagari Sungai Pua dalam penanggulangan banjir lahar dingin pascaerupsi Gunung Marapi merupakan manifestasi dari pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat lokal. Berdasarkan teori peran pemerintah menurut (Sedarmayanti, 2019), keberhasilan pelaksanaan peran pemerintah sangat ditentukan oleh tiga indikator utama, yaitu peran sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Sungai Pua telah menjalankan ketiga peran tersebut, namun efektivitasnya masih terbatas karena adanya berbagai kendala struktural dan nonstruktural.

Peran sebagai Regulator. Hasil penelitian menunjukkan peran regulator Pemerintah Nagari Sungai Pua masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan tidak adanya Peraturan Nagari (Pernag) khusus tentang penanggulangan bencana, keterbatasan dokumen perencanaan yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana, dan ketergantungan pada kebijakan dari tingkat atas. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Oktarina & Alhadi, 2024) yang menemukan bahwa peran pemerintah nagari dalam mitigasi bencana abrasi belum optimal akibat keterbatasan anggaran, kurangnya sarana prasarana, lemahnya sosialisasi kebencanaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian (Anggraini & Agustina, 2021) juga menegaskan bahwa pemerintah nagari berkewajiban mengintegrasikan penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nagari, termasuk penyusunan Rencana Kontinjensi serta kebijakan berbasis risiko. Meskipun demikian, proses perumusan kebijakan di Nagari Sungai Pua dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, menunjukkan komitmen pelibatan masyarakat meskipun belum didukung payung hukum yang memadai.

Peran sebagai Fasilitator. Peran fasilitator telah berjalan cukup baik, terutama dalam pelayanan administratif dan koordinasi. Hal ini sejalan dengan (Safitri et al., 2025) yang menemukan peran pemerintah cukup melalui sosialisasi, normalisasi sungai, dan gotong royong. BNPB (2024) menyatakan fasilitasi kebencanaan meliputi penyediaan sarana

pemulihan dan pembentukan kemitraan. Namun kendala tetap ada pada fasilitasi infrastruktur yang bergantung pada kabupaten, serta KSB yang masih memerlukan penguatan kelembagaan (Nisak & Alhadi, 2024). Penelitian ini juga menemukan bahwa KSB yang telah dibentuk masih memerlukan penguatan, baik dari sisi administrasi, program kerja, maupun kapasitas keanggotaan, sejalan dengan Juneri dan Mubarak (2019) tentang keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana prasarana sebagai kendala pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal.

Peran sebagai Pelaksana**.** Peran pelaksana berjalan cukup baik dalam penyaluran bantuan dan gotong royong, sejalan dengan (Fauzi & Jumiati, 2022). Namun perbaikan infrastruktur kewenangan kabupaten masih lambat, dan program pemulihan ekonomi masih terbatas jangkauannya. Hal ini sejalan dengan Ananda (2025) yang menemukan rendahnya kesiapsiagaan keluarga di Nagari Sungai Pua. Dalam (BNPB, 2024) dan penelitian (Khaerani, 2022) menyatakan bahwa pelaksanaan program penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan agar pemulihan masyarakat dapat berjalan efektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa program pemulihan ekonomi melalui bantuan bibit pertanian dan permodalan BUMNag masih terbatas jangkauannya.

Faktor Pendukung dan Penghambat. Faktor pendukung utama adalah gotong royong dan koordinasi yang baik, sejalan dengan (Ilham & Alhadi, 2025) yang menemukan bahwa peran kultural pemerintah nagari dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong menjadi faktor pendukung keberhasilan penanggulangan bencana. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran dan kewenangan, sejalan dengan (Nisak & Alhadi, 2024; Juneri & Mubarak, 2019). Hambatan struktural berupa anggaran terbatas, kewenangan sempit, dan kendala jarak ini secara bersama-sama memperlambat proses pemulihan pascabencana. Selain itu, faktor sosial budaya seperti stigma terhadap korban bencana dan keengganan relokasi juga menjadi penghambat yang membutuhkan pendekatan edukatif dan perubahan pola pikir masyarakat secara menyeluruh (Baehaqie et al., 2023).

Secara keseluruhan, implementasi peran Pemerintah Nagari Sungai Pua dalam penanggulangan banjir lahar dingin pascaerupsi Gunung Marapi telah berjalan namun belum optimal. Berdasarkan teori (Sedarmayanti, 2019), keberhasilan pelaksanaan peran pemerintah menuntut sinergi antara kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan komunikasi berbasis komunitas, dan integrasi lintas sektor yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Nagari Sungai Pua dalam penanggulangan banjir lahar dingin pascaerupsi Gunung Marapi telah dilaksanakan melalui tiga peran utama, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana, namun implementasinya masih belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan struktural maupun nonstruktural. Dalam perannya sebagai regulator, Pemerintah Nagari Sungai Pua telah berupaya menyusun kebijakan dan melakukan perencanaan pemulihan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat serta berbagai pihak terkait, tetapi masih menghadapi kendala karena belum adanya Peraturan Nagari khusus tentang penanggulangan bencana dan keterbatasan kewenangan dalam menangani infrastruktur berskala besar yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Sebagai fasilitator, Pemerintah Nagari telah menunjukkan komitmen melalui kegiatan pendataan korban, pengurusan administrasi bantuan, koordinasi dengan BPBD dan lembaga terkait, fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat, serta pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagai unsur penting dalam respons kebencanaan. Meskipun demikian, peran fasilitasi tersebut masih terkendala oleh keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan ketergantungan terhadap dukungan pemerintah daerah dalam proses pemulihan infrastruktur. Selanjutnya, sebagai pelaksana, Pemerintah Nagari Sungai Pua telah menjalankan berbagai tindakan nyata berupa penyaluran bantuan secara tepat sasaran, pelaksanaan gotong royong, pendampingan relokasi masyarakat dari zona rawan, serta program pemulihan ekonomi melalui bantuan pertanian dan permodalan. Namun, pelaksanaan tersebut belum berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran nagari, ruang kewenangan yang terbatas, serta lambatnya penanganan kerusakan infrastruktur yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Pelaksanaan penanggulangan bencana di Nagari Sungai Pua didukung oleh faktor internal dan eksternal seperti tingginya semangat gotong royong masyarakat, dukungan perantau, koordinasi antarlembaga, serta bantuan dari BPBD dan Pemerintah Kabupaten Agam. Di sisi lain, hambatan berupa keterbatasan anggaran, kapasitas aparatur, fasilitas kebencanaan, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam proses relokasi, serta kendala koordinasi dan aksesibilitas masih menjadi faktor yang menghambat efektivitas pemulihan pascabencana. Dengan demikian, berdasarkan perspektif Sedarmayanti, keberhasilan peran pemerintah dalam penanggulangan bencana sangat bergantung pada kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antarinstansi, sehingga penguatan kelembagaan nagari dan peningkatan kapasitas pengelolaan bencana

menjadi kebutuhan penting untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan di Nagari Sungai Pua.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai peran pemerintahan tingkat lokal dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan pemerintah nagari dalam menghadapi bencana tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh kemampuan menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana melalui koordinasi, komunikasi, serta pemberdayaan masyarakat. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi nyata pelaksanaan penanggulangan banjir lahar dingin di tingkat nagari, termasuk berbagai tantangan yang muncul akibat keterbatasan kewenangan, anggaran, dan sumber daya. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Nagari Sungai Pua, Pemerintah Kabupaten Agam, dan lembaga kebencanaan dalam memperbaiki mekanisme koordinasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta menyusun strategi mitigasi dan pemulihan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat, tokoh lokal, dan perantau sebagai modal sosial dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan penanggulangan bencana berbasis nagari dengan menggunakan pendekatan komparatif antarwilayah yang memiliki karakteristik bencana berbeda. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas fokus kajian dengan menganalisis keterlibatan masyarakat, peran modal sosial, serta efektivitas Kelompok Siaga Bencana (KSB) dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan masyarakat, efektivitas koordinasi antarinstansi, serta dampak program pemulihan ekonomi pascabencana secara lebih terukur. Kajian mengenai hubungan antara kapasitas kelembagaan pemerintah nagari dengan keberhasilan pemulihan pascabencana juga penting dilakukan untuk menghasilkan model tata kelola kebencanaan tingkat lokal yang lebih adaptif dan dapat diterapkan pada wilayah lain yang memiliki risiko bencana serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, A. (2025). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kesiapsiagaan Keluarga dalam Menghadapi Bencana Banjir Lahar Dingin di Nagari Sungai Pua Tahun 2025* [Undergraduate thesis,

Universitas Andalas]. https://scholar.unand.ac.id/view/divisions/S1KM2024/2025.html

Anggraini, K. D., & Agustina, I. F. (2021). The role of village governments in reducing the risk of flood disaster through disaster preparedness villages. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 9*. https://doi.org/10.21070/ijccd.v9i0.750

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Pedoman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sosialisasi Penanggulangan Bencana*. https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/pedoman-nomor-3-tahun-2024

Baehaqie, M. A., Irfan, A., Abijaya, S., & Wildanu, E. (2023). Peran Pemerintahan Desa dalam Penanggulangan dan Pemulihan Pascabencana Banjir di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi, 17*(1), 14–19. https://doi.org/10.32534/jsfk.v17i01.3951

Birkmann, J., Cardona, O. D., Carreño, M. L., Barbat, A. H., Pelling, M., Schneiderbauer, S., Kienberger, S., Keiler, M., Alexander, D., Zeil, P., & Welle, T. (2013). Framing vulnerability, risk and societal responses: The MOVE framework. *Natural Hazards, 67*(2), 193–211. https://doi.org/10.1007/s11069-013-0558-5

Coppola, D. P. (2015). *Introduction to international disaster management* (3rd ed.). Butterworth-Heinemann. https://doi.org/10.1016/C2012-0-00768-2

Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*. Gadjah Mada University Press.

Fauzi, F., & Jumiati, J. (2022). Peran Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Objek Wisata Luak Gadang di Nagari Kamang Hilia. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, 4*(4), 261–265. https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i4.312

Ilham, & Alhadi, Z. (2024). Peran Pemerintah Nagari dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Administrasi Publik, 2*(2), 88–96.

Ilham, F., & Alhadi, Z. (2025). Peran Pemerintah dalam Mitigasi Bencana Banjir Bandang di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam. *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik, 9*(2), 89–98. https://doi.org/10.24036/jtrap.v9i2.167

Juneri, R., & Mubarak, A. (2019). Peran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Memperbaiki Kerusakan Lahan Bekas Tambang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, 2*(3), 139–146. https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.81

Khaerani, T. R. (2022). The role of local government in disaster management: Study on the Regional Disaster Management Agency in flood disaster mitigation in Samarinda City. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8*(1), 76–87. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v8i1.33118

Lavigne, F., Thouret, J.-C., Voight, B., Suwa, H., & Sumaryono, A. (2000). Lahars at Merapi volcano, Central Java: An overview. *Journal of Volcanology and Geothermal Research, 100*(1–4), 423–456. https://doi.org/10.1016/S0377-0273(00)00152-8

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Nisak, S. K., & Alhadi, Z. (2024). Kendala Pemerintah Nagari Alang Rambah Tapan dalam Upaya Mitigasi Bencana Banjir. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies, 3*(3), 299–303. https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.214

Oktarina, W., & Alhadi, Z. (2024). Peran Pemerintah dalam Mitigasi Risiko Abrasi di Nagari Pilubang Kabupaten Padang Pariaman. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies, 3*(2), 174–180. https://doi.org/10.24036/publicness.v3i2.205

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. (2023). *Laporan Aktivitas Gunung Marapi*.

Rahadhatul, & Hermon, D. (2023). Karakteristik Banjir Lahar Dingin di Kawasan Gunung Marapi. *Jurnal Kebencanaan, 3*(2), 90–107.

Safitri, L., Juita, E., Zuriyani, E., & Ulni, A. Z. (2025). Analisis Dampak Bencana Banjir Bandang terhadap Masyarakat di Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(3), 271–286. https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.32388

Sedarmayanti. (2012). *Good Governance Kepemerintahan yang Baik Bagian Pertama Edisi Revisi: Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar Maju.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suryanto, & Prasetyo, D. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Mitigasi Bencana. *Jurnal Administrasi Publik, 15*(2), 77–89.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2022). *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022: Our World at Risk—Transforming Governance for a Resilient Future*. https://www.undrr.org/gar/gar2022-our-world-risk-gar